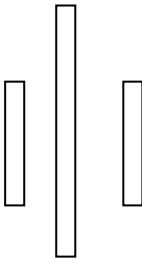
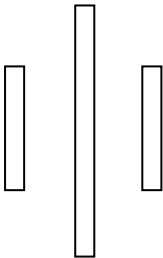




CAPAIAN INDIKATOR KINERJA



TAHUN 2024



BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN TABANAN
JL. GATOT SUBROTO NO.2 KEDIRI - TABANAN
TLP.(0361) 811171
2024

KATA PENGANTAR

Atas rahmat Tuhan Yang Maha Esa, kami bersyukur dapat menyusun Laporan Capaian Indikator Kinerja Tahun 2024 pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

Capaian Indikator Kinerja ini adalah hal yang wajib dilakukan oleh setiap unit kerja di lingkup Pemerintah Kabupaten Tabanan dalam kerangka *good governance* seperti yang tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Perpres tersebut mewajibkan instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan negara untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, serta kewenangan pengelolaan sumber daya dan kebijakan yang diambil. Capaian indikator kinerja ini memberikan gambaran kinerja BPBD dalam pembangunan daerah.

Rampungnya dokumen capaian indikator kinerja ini tidak terlepas dari komitmen dan kerja keras aparatur BPBD. Untuk itu, kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah memberikan data dan informasi sehingga laporan ini dapat dipertanggungjawabkan.

Dengan berbagai keterbatasan yang ada, dimohon masukan dan sarannya agar lebih meningkatnya kinerja Badan Penanggulangan Bencana secara terukur, berkelanjutan dan berdampak luas bagi masyarakat.

Tabanan, 3 Januari 2025

Kepala Pelaksana

Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kabupaten Tabanan



[Signature]

I Nyoman Srinadha Giri, S.E

Pembina Tk. I (IV/ b)

NIP. 19740624 200604 1 010

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i

DAFTAR ISI..... ii

BAB I PENDAHULUAN..... 1

 1.1 Latar Belakang..... 1

 1.2 Dasar Hukum 2

 1.3 Tujuan 2

BAB II PENGUKURAN INDIKATOR KINERJA..... 3

 2.1 Pengukuran SPM 3

 2.2 Pengukuran IKD 3

 2.3 Pengukuran IKT..... 3

 2.4 Pengukuran IKU 3

 2.5 Pengukuran IKP 4

 2.6 Pengukuran IKK 4

 2.7 Pengukuran IKS 4

BAB III CAPAIAN INDIKATOR KINERJA 6

 3.1 Capaian Indikator Kinerja SPM..... 6

 3.2 Capaian Indikator Kinerja Indeks Kinerja Daerah..... 6

 3.3 Capaian Indikator Kinerja Tujuan..... 8

 3.4 Capaian Indikator Kinerja Utama 6

 3.5 Capaian Indikator Kinerja Program..... 6

 3.6 Capaian Indikator Kinerja Kegiatan 6

 3.7 Capaian Indikator Kinerja Sub Kegiatan..... 6

BAB IV PENUTUP 11

 4.1 Kesimpulan 11

 4.2 Saran..... 11

LAMPIRAN

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang.

Pemerintah pusat telah menetapkan Rencana Induk Penanggulangan Bencana Tahun 2020-2044, dimana dalam Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) melalui tiga strategi yaitu : 1). Rencana aksi dalam bentuk mitigasi bencana, 2). Rencana penanggulangan kedaruratan bencana dalam bentuk rencana kontigensi, dan 3). Rencana pemulihan prabencana dalam bentuk rencana rekuntruksi dan rehabilitasi pasca bencana.

Prioritas pembangunan Provinsi Bali telah sinergis dengan prioritas pembangunan Kabupaten Tabanan, sehingga dalam kebencanaan sesuai prioritas ketiga yakni jaminan sosial dan ketenagakerjaan maka pemerintah daerah terus berinovatif dalam mewujudkan daerah aman dan nyaman sehingga perekonomian dan inventasi dapat berkembang.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tabanan telah menetapkan strategi dalam manajemen bencana dengan mempertimbangkan isu-isu strategis yang dihadapi sehingga dapat melakukan inovasi program dan kegiatan prioritas. Adapun isu strategis yang dihadapi dan prioritas ditangani di tahun 2022 yaitu : 1). Pelayanan informasi (edukasi) rawan bencana kepada multi pihak, 2). Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana untuk investasi pembangunan, 3). Pelayanan penyelamatan dan evaluasi korban bencana untuk pulih lebih cepat (*risilien*).

Pemerintah Kabupaten Tabanan melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah telah berupaya menangani isu staretgis yang dihadapi dengan program prioritas baik yang sumber dananya dari APBN maupun APBD agar multi pihak (*stakeholder*) semuanya dapat memenuhi harapan pemerintah pusat maupun daerah untuk menjadi tanggap, siaga, dan tangguh dalam menghadapi risiko bencana.

Amanah Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2011 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi Indonesia Tahun 2010-2025. Hal ini dilakukan untuk mewujudkan *good and clean government* yang telah ditetapkan melalui percepatan implementasi reformasi birokrasi. Dengan demikian, pemerintah melakukan penataan kembali terhadap sistem penyelenggaraan pemerintah, dimana birokrasi akan menjadi tulang punggung perubahan yang didukung oleh aparatur berAKHLAK.

Untuk mengukur keberhasilan dan permasalahan yang dihadapi dalam melaksanakan program prioritas maka setiap triwulan dilakukan pengukuran dan capaian indikator kinerja perangkat daerah di BPBD.

1.2. Landasan Hukum.

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana
2. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
3. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal
4. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tabanan
5. Peraturan Daerah Nomor 09 Tahun 2022 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tabanan
6. Peraturan Bupati Nomor 105 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksana Peraturan Daerah Nomor 09 Tahun 2022 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tabanan
7. Keputusan Bupati Tabanan Nomor 180/601/01/HK/2024 tentang Pembentukan Tim Sistem Pengendalian Internal Pemerintah pada Badan Peanggulangan Bencana Daerah Tahun 2024

1.3. Tujuan.

Tujuan dari pelaporan ini adalah memberikan informasi capaian indikator kinerja :

- a. Capaian Indikator Kinerja SPM
- b. Capaian Indikator Kinerja Indek Kinerja Daerah
- c. Capaian Indikator Kinerja Tujuan
- d. Capaian Indikator Kinerja Utama
- e. Capaian Indikator Kinerja Program
- f. Capaian Indikator Kinerja Kegiatan
- g. Capaian Indikator Kinerja Sub Kegiatan

II. PERENCANAAN KINERJA

2.1 Pengukuran Indikator Kinerja SPM Sub Bencana

Pengukuran kinerja SPM yang tertuang pada Bab VIII RPJMD tentang IKU pemerintah daerah nomor 1. Pengukuran SPM ditetapkan untuk memudahkan mengukur capaian kinerja dan menjadi dasar evaluasi dan analisis lebih lanjut. Adapun formula pengukuran kinerja seperti berikut ini.

Tabel Pengukuran SPM Sub Urusan Bencana

SPM	Indikator	Formula / dasar pengukuran	Target	Penanggung jawab
Sub Urusan Bencana	Persentase capaian standar pelayanan minimal sub urusan bencana	Jumlah realisasi pelayanan kebencanaan dibagi target layanan kebencanaan dikali 100	100%	Bidang I Bidang II Bidang III Sekretriati

2.2 Pengukuran Indikator Kinerja Daerah

Pengukuran kinerja IKD yang tertuang pada Bab VIII RPJMD ditetapkan untuk memudahkan mengukur capaian kinerja dan menjadi dasar evaluasi dan analisis lebih lanjut. Adapun formula pengukuran kinerja seperti berikut ini.

Tabel 2.12 Pengukuran Indikator Kinerja Daerah

Urusan	Indikator	Formula / dasar pengukuran	Target	Penanggung jawab
Aspek pelayanan umum, urusan wajib dasar	Tingkat waktu tanggap layanan kebencanaan	Jumlah layanan cepat kebencanaan dibagi jumlah permohonan layanan kebencanaan dikali 100	100%	Bidang I Bidang II Bidang III Sekreatriati

2.3 Pengukuran indikator Kinerja Tujuan

Badan Penanggulangan Bencana Daerah berkolaborasi dalam pencapaian indikator kinerja tujuan. Adapun *stakeholder* (Dinas LH, Dinas PUPR, Dinas Sosial P3A, Dians Perhubungan) yang berperan dalam pencapaian indikator menurunkan Indeks Risiko Bencana yang dikukur dari evaluasi 71 indikator dan 284 pertanyaan penilaian IKD yang nilainya dikeluarkan oleh BNPB. Adapun target kinerjanya berikut ini.

Tabel 2.1 Pengukuran Indikator Tujuan

Tujuan BPBD	Indikator tujuan	Formula	Target
Terwujudnya Tabanan tangguh mulai dari desa dalam menghadapi bencana	Menurunkan Indeks Risiko Bencana	Hasil evaluasi 71 indikator dan 284 pertanyaan penilaian dari BNPB	147,42
Terwujudnya Kualitas tata Kelola pemerintahan di OPD	Hasil Evaluasi penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Nilai evaluasi penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	85,00

2.4 Pengukuran Indikator Kinerja Utama

Badan Penanggulangan Bencana Daerah berkolaborasi dalam pencapaian indikator kinerja utama. Adapun *stakeholder* yang berperan dalam pencapaian 2 (dua) indikator ini adalah Aparatur BPBD, TRC, dan Satgas. Adapun targetnya berikut ini.

Tabel 2.2 Pengukuran Indikator Utama

Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Formula	Target Kinerja
Terwujudnya Tabanan Tangguh mulai dari Desa dalam menghadapi Bencana	Pengurangan Risiko Bencana	Persentase waktu tanggap layanan kebencanaan	Realisasi tanggap kebencanaan dibagi usulan dan pengaduan yang masuk dikalikan 100	100%
Terwujudnya Kualitas tata Kelola pemerintahan di OPD	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja BPBD	Nilai LKjIP	Nilai rewiu LKjIP dari Inspektorat	A (81)

2.5 Pengukuran Indikator Kinerja Program

Badan Penanggulangan Bencana Daerah berkolaborasi dalam pencapaian indikator kinerja program. Adapun *stakeholder* yang berperan dalam pencapaian 2 (dua) indikator ini adalah Aparatur BPBD, TRC, dan Satgas. Adapun targetnya berikut ini.

Tabel 2.3 Pengukuran Indikator Program

Progam	Indikator Kinerja	Formula	Target Kinerja
Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kab./Kota	Persentase administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi BPBD	Realisasi anggaran pelayanan dibagi target anggaran triwulan dikalikan 100	100%
Program	Persentase penanganan	Realisasi	100%

Penanggulangan Bencana	prabencana, tanggap darurat dan pasca bencana	penanganan bencana dibandingkan dengan usulan atau pengaduan masyarakat yang masuk dikalikan 100	
------------------------	---	--	--

Sumber : DPA, 2024

2.6 Pengukuran Indikator Kinerja Kegiatan

Badan Penanggulangan Bencana Daerah berkolaborasi dalam pencapaian indikator kinerja kegiatan. Adapun target kinerjanya berikut ini

Tabel 2.4 Pengukuran Indikator Kegiatan

Kegiatan	Indikator Kinerja	Formula	Target KInerja
Kegiatan pelayanan informasi rawan bencana kabupaten/kota	Jumlah daerah yang meningkat kapasitas sistem informasi kebencanaan	Jumlah kecamatan yang mendapatkan edukasi dan informasi rawan bencana	10 kecamatan
Kegiatan pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Persentase wilayah yang memenuhi standar kesiapsiagaan bencana	Realisasi wilayah kecamatan yang mendapatkan pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana dibagi target perencanaan dikalikan 100	100%
Kegiatan pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Prosentase penanganan darurat bencana pada setiap kejadian bencana	Realisasi wilayah kecamatan yang mendapatkan pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana dibagi target perencanaan dikalikan 100	100%
Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Jumlah penataan sistem dasar penanggulangan bencana yang terdata	Jumlah dokumen kajian kebutuhan pasca bencana setahun	1 dok
Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja yang disusun	Jumlah jenis dokumen perencanaan, pengukuran, evaluasi, dan pelaporan kinerja dihasilkan setahun	3 dok
Administrasi Keuangan Perangkat daerah	Persentase terpenuhinya administrasi keuangan BPBD	Realisasi adminsitasi keuangan dibagi target perencanaan administrasi keuangan dikalikan 100	100%
Administrasi umum Perangkat Daerah	Persentase terpenuhinya administrasi umum	Realisasi adminsitasi umum dibagi target perencanaan administrasi umum	100%

	BPBD	dikalikan 100	
Pengadaan BMD penunjang urusan PD	Prosentase terpenuhinya pengadaan BMD	Realisasi pengadaan BMD dibagi target perencanaan pengadaan BMD dikalikan 100	100%
Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	Persentase tersedianya jasa penunjang urusan kantor	Realisasi penyediaan jasa penunjang urusan kantor dibagi target perencanaan penyediaan jasa penunjang dikalikan 100	100%
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase terpenuhinya BMD yang menunjang urusan kantor	Realisasi pemenuhan BMD yang layak oeprasional dibagi target perencanaan pemenuhan BMD dikalikan 100	100%

2.7 Pengukuran Indikator Kinerja Sub Kegiatan

Badan Penanggulangan Bencana Daerah berkolaborasi dalam pencapaian indikator kinerja kegiatan. Adapun target kinerjanya berikut ini

Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Formula	Target Klinerja
Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja yang disusun		
• Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Renja dan RKA dihasilkan	2 dokumen
• Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan kinerja i nstansi pemerintah dihasilkan	1 laporan
• Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase terpenuhinya administrasi keuangan BPBD		
• Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji danTunjangan ASN	Jumlah pegawai ASN yang menerima gaji dan tunjangan setahun	14 orang
• Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (laporan)	Jumlah laporan keuangan keuangan yang dihasilkan	2 laporan
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase terpenuhinya Administrasi Umum BPBD		
• Penyediaan Komponen Instalasi	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/	Jumlah paket komponen instanlasi listrik untuk	1 paket

Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	penerangan kantor disediakan	
• Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Jumlah paket peralatan rumah tangga penunjang pelayanan kantor disediakan	1 paket
• Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	Jumlah logistic kantor penunjang pelayanan kantor disediakan	1 paket
• Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Jumlah paket barang cetakan dan pengagndaan penunjang pelayanan kantor disediakan	2 paket
• Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/ Material yang Disediakan	Jumlah paket bahan material penunjang pelayanan kantor disediakan	3 paket
• Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan hasil koordinasi kebijakan penanggulangan bencana ke pusat dilaporkan	2 laporan
• Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah laporan penatausahaan arsip triwulanan dilaporkan	4 dok
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase tersedianya jasa penunjang urusan kantor		
• Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan penggunaan materai untuk administrasi perkantoran	12 laporan
• Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Jumlah laporan penggunaan listrik, air dan telepon untuk menunjanag pelayanan perkantoran	3 laporan
• Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum untuk menunjanag pelayanan publik	12 laporan
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terpeliharanya BMD yang menunjang urusan kantor		
• Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional roda dua, roda empat, dan roda enam yang dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	12 unit
• Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Jumlah peralatan kerja penunjnag operasional administrasi terpelihara baik	16 unit
Pelayanan Informasi	Jumlah daerah yang		

Rawan Bencana Kabupaten/Kota	meningkat kapasitas sistem informasi kebencanaan		
Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana bencana Kabupaten/Kota yang memperoleh sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi sesuai jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya selama 1 (satu) tahun	Jumlah warga negara di wilayah rawan bencana yang mendapatkan sosialisasi KIE mitigasi bencana untuk ketangguhan bencana	10 kec
Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Persentase wilayah yg memenuhi standar kesiapsiagaan bencana		
• Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Jumlah Kawasan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dalam Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	Jumlah desa tangguh bencana yang terbangun dan disahkan oleh Perbekel	2 desa di kawasan rawan bencana
• Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Jumlah Aparatur dan Warga Negara yang Mengikuti Gladi Kesiapsiagaan	Jumlah aparatur dan warga negara (siswa) yang mengikuti gladi kesiapsiagaan bencana	100 orang
Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Persentase Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana		
• Renspon Cepat Darurat Becana Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen SK penatapan status darurat bencana dan SKPDP yang ditetapkan paling lama 1x24 jam berdasarkan dokumen kaji cepat	Jumlah dokumen SK penatapan tanggap bencana berdaarkan dokumen kaji cepat kebencanaan	2 SK
Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Jumlah penataan sistem dasar penanggulangan bencana yang terdata	Jumlah dokumen kajian kebutuhan pasca bencana setahun	
• Koordinasi penanganan pasca bencana kabupaten/ kota	Jumlah dokumen penanganan pasca bencana kabupaten/kota melalui pengkajian kebutuhan pascabencana dan rencana rehabilitasi dan rekontruksi pasca bencana	Jumlah dokumen permohonan dana pasca bencana yang diverifikasi setahun	1 dok

III. CAPAIAN INDIAKTOR KINERJA

3.1 Capaian Indikator Kinerja SPM

Capain kinerja SPM sub bencana mendukung kinerja SPM urusan wajib dasar yang tertuang pada indikator RPJMD SB. Adapun kinerjanya seperti berikut ini.

Tabel Capaian Kinerja SPM Sub Bencana

No	Uraian	Indikator	Realisasi / triwulanan (%)			
			I	II	III	IV
1	SPM Sub Urusan Bencana	Persentase capaian standar pelayanan minimal sub urusan bencana	49,15	61,20	74,17	100,0

Sumber : spm.kemendagri.go.id, 2024

3.2 Capaian Indikator Kinerja Daerah

Capain idikator kinerja daerah mendukung indikator kinerja kunci yang tertuang pada indikator RPJMD SB. Adapun kinerjanya seperti berikut ini.

Tabel Capaian Kinerja Daerah

No	Uraian	Indikator	Realisasi / triwulanan			
			I	II	III	IV
1	Aspek pelayanan umum, urusan wajib dasar	Tingkat waktu tanggap layanan kebencanaan	100%	100%	100%	100%

Sumber : Laporan Bencana, 2024

3.3 Capaian Indikator Kinerja Tujuan

Capain idikator kinerja tujuan ini mendukung indeks ketahanan daerah yang diamanahkan BNPB untuk menurunkan risiko bencana. Adapun kinerjanya seperti berikut ini.

- menurunkan indeks risiko bencana Tahun 2023 yang terbit Januari 2024 dengan capaian 136,90 hasil penilaian Badan Nasional Penanggulangan Bencana setahun sekali dan penialian tahun 2024 akan tertib peniapiannya tahun berikutnya (Januari 2025).
- hasil evaluasi penilaian mandiri terhadap reformasi birokrasi yang difasilitasi Bagian Organsiasi Setda dan Inspektorat dengan nilai 78,48 dari MENPAN RB. Adapun capaian kinerja seperti tabel berikut ini.

Tabel Capaian Kinerja Tujuan

No	Tujuan	Indikator	Realisasi / triwulanan			
			I	II	III	IV
1	Terwujudnya Tabanan tangguh mulai dari desa dalam menghadapi Bencana	Menurunkan Indeks Risiko Bencana	136,90	Belum ada nilai	Tahap pengisian indikator	Klarifikasi isian indikator
2	Terwujudnya kualitas tata kelola pemerintahan di OPD	Hasil evaluasi penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Belum ada nilai	Belum ada nilai	Belum ada nilai	78,48

Sumber : Data diolah,2024

3.4 Capaian Indikator Kinerja Utama

BPBD dalam mencapai 2 (dua) kinerja utama di tahun 2024 sudah mampu 85,71%. Capain kinerjanya :

- Semua usulan atau pengaduan masyarakat akan kebencanaan telah dapat dilayani/ diselesaikan secara administarsi oleh manajemen BPBD dan secara teknis oleh TRC (Tim Reaksi Cepat) BPBD dengan dukungan 35 orang personal yang bertugas dua sip yang terbagi 4 (empat) kelompok sehingga 24 jam personal TRC siaga.
- Akuntabiitas kinerja perangkat daerah yang dinilai oleh Isepktorat melalui dokumen LKjIP sebagai bagain dari dokuemn SAKIP sudah memperoleh nilai 62,25 atau B yang dikeluarkan nilainya tahun 2021 dan dengan nilai 70,41 atau BB yang dikeluarkan nilainya di tahun 2023. Hasil LHE 2024 atas SAKIP 2023 telah dikeluarkan LHE oleh Inspektorat dengan nilai BB (71,41.) Adapun rinciannya seperti erkut ini.

Tabel Capaian Kinerja Utama

No	Tujuan	Indikator	Realisasi / triwulanan			
			I	II	III	IV
1	Pengurangan Risiko Bencana	Persentase waktu tanggap layanan kebencanaan	100%	100%	100%	100%
2	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja BPBD	Nilai LKjIP	71,41	71,41	71,41	71,41
	Rata-rata (%)		85,71	85,71	85,71	85,71

Sumber : Data diolah, 2024

3.5 Capaian Indikator Kinerja Program

Pencapaian indikator kinerja dua program sudah 100% adapun rinciannya sebagai berikut :

- persentase administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi

BPBD dengan realisasi fisik layanan administrasi dan kelancaran pelayanan publik 100,0% .

- prosentase penanganan prabencana, tanggap bencana, dan pasca bencana dengan realisasi fisik layanan sudah terealisasi 100% dengan waktu tanggap bencana 24 jam 7 hari kerja. Adaun rinciannya seperti berikut ini

Tabel Capaian Kinerja Program

No	Tujuan	Indikator	Realisasi / triwulanan			
			I	II	III	IV
1	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kab./Kota	Persentase administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi BPBD	22,34%	50,0%	75%	100%
2	Program Penanggulangan Bencana	Persentase penanganan prabencana, tanggap darurat dan pasca bencana	100,0%	100%	100%	100%
	Rata-rata (%)		58,0	75,0	87,5	100

3.6 Capaian Indikator Kinerja Kegiatan

Pencapaian indikator kinerja kegiatan pada prabencana, tanggap bencana, dan pasca bencana seperti tabel berikut ini.

Tabel 3.4 Capaian Kinerja Kegiatan

No	Kegiatan	Indikator	Realisasi / triwulanan			
			I	II	III	IV
1	Kegiatan pelayanan informasi rawan bencana kabupaten/kota	Jumlah daerah yang meningkat kapasitas sistem informasi kebencanaan	5 kec	10 kec	10 kec	10 kec
2	Kegiatan pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Persentase wilayah yang memenuhi standar kesiapsiagaan bencana	0%	100%	100%	100%
3	Kegiatan pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Prosentase penanganan darurat bencana pada setiap kejadian bencana	100%	100%	100%	100%
4	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Jumlah penataan sistem dasar penanggulangan bencana yang terdata	1 dok	0 dok	1 dok	1 dok

4	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja yang disusun	1 dok	2 dok	2 dok	3 dok
5	Administrasi Keuangan Perangkat daerah	Persentase terpenuhinya administrasi keuangan BPBD	26,83%	35,42%	74,21%	85,29%
6	Administrasi umum Perangkat Daerah	Persentase terpenuhinya administrasi umum BPBD	19,36%	39,31%	70,51%	100%
7	Pengadaan BMD penunjang urusan PD	Persentase pengadaan barang BMD yang layak operasional	Tidak dapat dana	Tidak dapat dana	Tidak dapat dana	Tidak dapat dana
8	Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	Persentase tersedianya jasa penunjang urusan kantor	15,64%	24,36%	72,31%	100%
9	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase terpenuhinya BMD yang menunjang urusan kantor	17,04%	43,11%	67,70%	100%
	Rata-rata (%)		24,07	47,48	80,13	98,16

Sumber : Data PPTK, 2024

3.7 Capaian Indikator Kinerja Sub Kegiatan
Pencapaian indikator kinerja subkegiatan pada prabencana, tanggap bencana, dan pasca bencana seperti tabel berikut ini.

Tabel Capaian Kinerja Sub Kegiatan

N o	Kegiatan/ Sub kegiatan	Indikator	Realisasi / triwulanan			
			I	II	III	IV
1	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja yang disusun				
	• Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 dok		1 dok	
	• Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 dok			
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase terpenuhinya administrasi keuangan BPBD				
	• Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji danTunjangan ASN	14 org	14 org	14 org	14 org

	• Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (laporan)	1 lapr		1 lapr	
3	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase terpenuhinya Administrasi Umum BPBD				
	• Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 pkt	1 pkt	1 pkt	1 pkt
	• Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 pkt	1 pkt	1 pkt	1 pkt
	• Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	1 pkt	1 pkt	1 pkt	1 pkt
	• Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 pkt		1 pkt	
	• Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/ Material yang Disediakan	1 pkt	1 pkt	1 pkt	
	• Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 lapr			1 lapr
	• Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 dok	1 dok	1 dok	1 dok
4	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase tersedianya jasa penunjang urusan kantor				
	• Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	150 lpr			
	• Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 lapr	1 lapr	1 lapr	1 lapr
	• Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	3 lapr	3 lapr	3 lapr	3 lapr
5	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terpeliharanya BMD yang menunjang urusan kantor				
	• Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	3 unit	3 unit	4 unit	2 unit
	• Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	4 unit	4 unit	5 unit	3 unit
6	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah daerah yang meningkat kapasitas sistem informasi kebencanaan				
	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana bencana Kabupaten/Kota yang memperoleh sosialisasi,	60 org	-	-	-

		komunikasi, informasi dan edukasi sesuai jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya selama 1 (satu) tahun				
7	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Persentase wilayah yg memenuhi standar kesiapsiagaan bencana				
	• Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Jumlah Kawasan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dalam Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	-	-	2 desa	-
	• Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Jumlah Aparatur dan Warga Negara yang Mengikuti Gladi Kesiapsiagaan	-	450 org	-	-
8	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Persentase Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana				
	• Renspon Cepat Darurat Becana Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen SK penatapan status darurat bencana dan SKPDP yang ditetapkan paling lama 1x24 jam berdasarkan dokumen kaji cepat	100 %	100 %	100 %	100 %
9	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Jumlah penataan sistem dasar penanggulangan bencana yang terdata				
	• Koordinasi penanganan pasca bencana kabupaten/ kota	Jumlah dokumen penanganan pasca bencana kabupaten/kota melalui pengkajian kebutuhan pascabencana dan rencana rehabilitasi dan rekontruksi pasca bencana				1 SK

Sumber : PPTK, 2024

IV. PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Indikator kinerja sudah diukur capaian kinerja secara berkala di BPBD. Capaian kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang diukur periode Januari sd Desember rata-rata capaian indikator kinerja SPM sub Bencana 100,0%, capaian indikator kinerja tujuan daerah %, capaian indikator kinerja utama 85,71% , capaian indikator kinerja program 100,0%, capaian indikator kinerja kegiatan 98,16%, dan capaian indikator kinerja sub keegiatan 100,0%.

4.2 Saran

Dari uraian hasil capaian kinerja tersebut di atas, maka diajukan saran-saran sebagai berikut :

- a. Untuk meningkatkan kinerja pada setiap urusan yang menjadi kewenangan Badan Penanggulangan Bencana Daerah, maka perlu dilakukan penajaman skala prioritas sasaran strategis yang akan dilaksanakan tahun berikutnya dan dukungan pendanaan pada masing-masing sasaran strategis sehingga kinerja dapat lebih dioptimalkan.
- b. Untuk mengatasi permasalahan yang masih sulit dilakukan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah perlu ditingkatkan pelaksanaan koordinasi lintas instansi dan masyarakat pemerhati kebencanaan untuk meningkatkan pelayanan kebencanaan.

Kepala Pelaksana
Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kabupaten Tabanan



I Nyoman Srinadha Giri, S.E
Pembina Tk. I (IV/ b)
NIP. 19740624 200604 1 010

